



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA 2024



**2023**

**LAPORAN KINERJA**

**PEMERINTAH DAERAH**





**Ir. H. M. AL YASIN ALI, M.MT**

Plt. Gubernur Maluku Utara



GUBERNUR MALUKU UTARA

## KATA PENGANTAR

Pt.GUBERNUR MALUKU UTARA  
Ir. H. M. Al Yasin Ali, M.MT

---



Dengan menaikkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Semoga laporan yang disampaikan ini dapat diterima dan dipahami serta memaknai sebagai perubahan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperbaiki capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Tim Penyusun dan pihak terkait lainnya.

Berbagai dinamika sosial, ekonomi dan regulasi nasional yang berkembang laju di pusat dan daerah semakin memberi penguatan otonomisasi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Hal ini menuntut kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Program dan



Kegiatan dari setiap sasaran dan indikator yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam rangka mencapai Visi dan Misi organisasi secara terukur melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periode sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan Visi, Misi, Sasaran serta Indikator Kinerja yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Organisasi yang ditetapkan. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 ini diharapkan tidak sebatas sajian data dan analisis capaian kinerjanya tapi menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi yang sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sofifi, 11 Maret 2024  
Pt. GUBERNUR MALUKU UTARA  
  
H. M. AL YASIN ALI, M.MT



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
**INSPEKTORAT**  
Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak Sofifi  
**SOFIFI**

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami Telah mereviu Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 Sesuai Pedoman atas Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Sofifi, 27 Maret 2024

Inspektur  
  
**NIRWAN M. T. ALI, SH., MM. CGCAE**  
Pemimpin Utama Madya  
NIP. 19710625 199803 1 008



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Government*), khususnya dalam menciptakan transparansi yang merupakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan dan penyampaian informasi serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, demikian pula dalam upaya menciptakan pemerintahan yang akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), maka sebagai implementasi Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun Keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan 8 Sasaran Strategis dengan ringkasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	6,25	6,46	96,64
Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	-	-	-	-
Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	-	-	-	-
Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,729	1,038	57,61



saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah

Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	-	-	-	-
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	30,74	36,27	117,9
	Indeks Rasio Gini	0,285	0,300	105,6
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	41,24	56,75	137,61

Untuk pengukuran tahun 2023 yang mana dari 5 indikator kinerja sasaran tersebut setelah diukur tingkat keberhasilan dan kegagalannya, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Jumlah indikator dengan kategori **sangat baik** sejumlah 3 indikator kinerja.
2. Jumlah indikator dengan kategori **baik** sejumlah 0 indikator kinerja
3. Jumlah indikator dengan kategori **cukup baik** sejumlah 1 indikator kinerja
4. Jumlah indikator dengan kategori **kurang baik** sejumlah 0 indikator kinerja
5. Jumlah indikator yang **tidak dapat diukur** adalah sejumlah 1 indikator kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dari 5 indikator kinerja sasaran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara umum masuk kategori “**BAIK**”. Adapun capaian kinerja tersebut diperoleh berkat upaya kerja keras dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi dan



Kabupaten/Kota beserta dukungan masyarakat Maluku Utara dan stakeholder dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan di tahun 2023.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**  
**SAMBUTAN GUBERNUR**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**1-43**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**44-59**

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**60-105**

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA**

**106-107**

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

#### 1. Kondisi Fisik Daerah

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara sampai 3° Lintang Selatan dan 124° - 129° Bujur Timur serta terbentang dari Utara ke Selatan sepanjang 770 km dan dari Barat ke Timur sepanjang 60 km. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km<sup>2</sup> atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km<sup>2</sup> atau 30,92 persen. Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033, terdapat perubahan luas wilayah laut dan luas wilayah darat dari penetapan sebelumnya sesuai hasil pengukuran dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi melalui persetujuan substantif Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Provinsi Maluku Utara secara Administratif memiliki batas wilayah, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku, Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 kota, 116 Kecamatan dan 1.176 Desa/Kelurahan, sedangkan Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten Kota yang dijabarkan pada Tabel berikut ini.

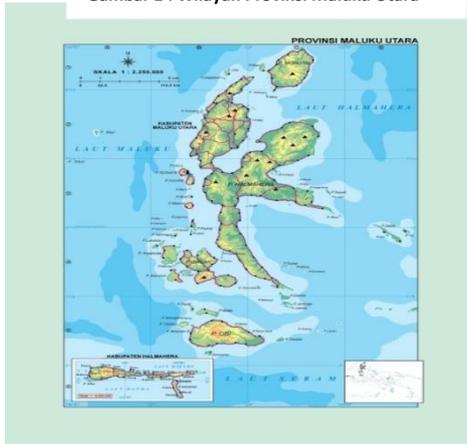
**Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Maluku Utara**

No	Kab/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah Darat (Km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah Laut (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Provinsi Maluku Utara	Soffi	32.004,57	113.796,53	145.801,10
2	Halmahera Selatan	Labuha	8.148,90	31.484,40	39.633,30
3	Halmahera Utara	Tobelo	3.896,90	19.536,02	23.432,92
4	Halmahera Barat	Jailolo	1.704,20	11.623,42	13.327,62
5	Halmahera Timur	Maba	6.571,37	7.695,82	14.267,19
6	Halmahera Tengah	Weda	2.653,76	6.104,65	8.758,41
7	Pulau Morotai	Daruba	2.476,00	13.170,01	15.646,01
8	Kepulauan Sula	Sanana	1.791,84	6.647,17	8.439,01
9	Pulau Taliabu	Bobong	3.004,48	7.697,29	10.701,77

10	KotaTidore Kepulauan	Soa Sio	1.645,73	4.293,20	5.938,93
11	Kota Ternate	Ternate	111,39	5.544,55	5.655,94
<b>Total</b>			<b>32.004,57</b>	<b>113.796,53</b>	<b>145.801,10</b>

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka, 2023

Gambar 1 : Wilayah Provinsi Maluku Utara



Luas wilayah Provinsi Maluku Utara berdasarkan pada tabel 1.1 tersebut diatas jika dilihat berdasarkan wilayah Kabupaten/ Kota, daerah yang memiliki luas terbesar adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni seluas 39.633,30 km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kota Ternate dengan luas wilayah hanya mencapai 5.655,94 km<sup>2</sup>

## 2. Batas Wilayah

Provinsi Maluku Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Pasifik
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Halmahera
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Seram

Berdasarkan luas wilayah tersebut, memungkinkan Provinsi yang dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 tersebut memiliki kondisi geografis yang strategis terhadap peluang investasi bisnis. Karena daerah ini diprediksi memiliki sumber daya alam melimpah di sektor perikanan dan kelautan dan dapat dijadikan primadona bisnis di Maluku Utara, selain sektor lainnya seperti Pertanian sub sektor Peternakan dan Perkebunan, sektor Perdagangan dan sektor Pariwisata serta sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang cukup tinggi.

## 2 : Posisi Provinsi Maluku Utara Laut Kepulauan Indonesia (ALKI III)



Selain itu, Provinsi Maluku Utara terletak pada posisi perbatasan negara Indonesia dengan perairan Internasional, yakni terhadap Laut Pasifik (Negara Palau) dan pada perairan yang relatif tidak jauh dengan perairan Negara Filipina.

Pada posisi yang merupakan perbatasan laut yang demikian, maka sistem pertahanan dan keamanan di wilayah ini harus mendapat perhatian serius karena menjadi gerbang perbatasan internasional. Berbagai risiko penyusupan atau infiltrasi, illegal fishing, bajak laut dan sebagainya mengancam Provinsi Maluku Utara karena posisinya yang berhadapan langsung dengan laut bebas Internasional. Di bagian sisi barat wilayah Provinsi Maluku Utara, dilalui ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia III), yang merupakan jalur lintasan utama pelayaran Internasional dari Pasifik melewati Indonesia.

Dengan adanya ALKI III ini, maka wilayah Provinsi Maluku Utara khususnya di kawasan perairannya menjadi suatu kawasan lintasan Internasional yang memerlukan perhatian ditinjau dari segi Pertahanan dan Keamanan Nasional. Adanya pangkalan Angkatan Laut (LANAL) di Ternate serta sebaran sejumlah Pos Angkatan Laut (POSAL) dan fasilitas Angkatan Udara di Morotai, telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan yang secara militer mendapat pengawalan ketat. Dengan demikian, maka jelas bahwa ditinjau dari segi geopolitik maupun keberadaan berbagai fasilitas Militer, telah menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai Kawasan Andalan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional RI.

### 3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Provinsi Maluku Utara yang merupakan Provinsi Kepulauan juga dibagi atas beberapa kawasan pengembangan sebagai kawasan strategis. Kawasan strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam RT/RW Provinsi Maluku Utara 2013 – 2033, meliputi:

- a) Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b) Kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya;
- c) Kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
- d) Kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dimaksud terdiri dari:

- 1) Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan perekonomian, dengan pengembangan Pemerintahan pada sektor pendidikan dan industri, meliputi:
  - a. Peningkatan pelabuhan Ternate sebagai pelabuhan ekspor;
  - b. Pengembangan kegiatan Pemerintahan tingkat Provinsi di Kota Sofifi;
  - c. Pengembangan kegiatan Pemerintahan tingkat Kabupaten di Tidore (Kota Soasio);
  - d. Pengembangan Pelabuhan Sofifi yang representatif sebagai Ibu Kota Provinsi;
  - e. Peningkatan bandar udara di Ternate;
  - f. Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dan sarana penyeberangan;
  - g. Peningkatan pelayanan fasilitas regional seperti pelabuhan laut, bandar udara, rumah sakit dan lain-lain di Ternate dan Sofifi;
  - h. Pengembangan dermaga peti kemas di Tidore untuk mengantisipasi luapan penumpukan petikemas di Ternate;



- i. Pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai "pintu keluar-masuk" yang menghubungkan dari/ke daratan Pulau Halmahera;
  - j. Peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang di Kota Ternate, dan Kota Tidore, terutama peningkatan aksesibilitas dari wilayah produksi ke pusat pengumpul atau pasar;
  - k. Pengembangan sarana pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus penunjang industri di Kota Ternate dan Kota Tidore;
  - l. Pengembangan permukiman baru untuk mengantisipasi permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk di Pulau Ternate, serta pengembangan sumber-sumber air bersih;
  - m. Pengembangan pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore sebagai strategi penunjang kehidupan industri rakyat; terutama wisata sejarah dengan adanya situs sejarah Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Tidore;
  - n. Pengembangan industri perkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli.
- 2) Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu dikembangkan sektor perkebunan dan kehutanan yang diarahkan pada:
- a. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
  - b. Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya dan penyeberangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara;
  - c. Pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di industri perkayuan;
  - d. Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan.
- 3) Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan dan industri pengolahan kayu serta kehutanan yang arah pengembangannya pada:
- a. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri;
  - b. Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan dan penyeberangan, dan pelabuhan laut);
  - c. Pengembangan pusat pemerintahan;
  - d. Pengembangan sumber daya manusia;
  - e. Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan;
  - f. Pengembangan pariwisata sejarah, terutama situs Kerajaan Bacan.



- 4) Kawasan Halmahera Selatan meliputi kecamatan Gane Barat dan kecamatan Gane Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada:
  - a. Pengembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan;
  - b. Pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah (antara Gane Barat dan Gane Timur);
  - c. Meningkatkan produktivitas perkebunan.
- 5) Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi) pertambangan nikel yang diarahkan pada:
  - a. Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
  - b. Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*;
  - c. Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- 6) Kawasan Strategis Morotai dikembangkan untuk sektor Pertahanan Keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada:
  - a. Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
  - b. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan;
  - c. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal;
  - d. Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;
  - e. Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain, seperti ke Galela (Pulau Halmahera);

- f. Pengembangan pariwisata.
- 7) Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Haltim, Halteng dan Pulau Jiuw diarahkan pada pengembangan pariwisata dan Hankam.
- 8) Kawasan Strategis Halut, Halbar dan Haltim diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.
- 9) Kawasan Pulau Gebe diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan pasca penambangan Nikel oleh PT. Aneka Tambang.
- 10) Kawasan pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan.

Gambar 3 : Peta Kawasan Strategis Provinsi Maluku Utara



Sumber: RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033

### 3.1. Pengembangan Kawasan Maluku Utara

Untuk mengembangkan suatu daerah dengan bentuk wilayah Kepulauan diperlukan konsep yang mempunyai tujuan utama mewujudkan keseimbangan wilayah daratan dan perairan (laut) antara daerah dan pulau terutama dalam hal tingkat pertumbuhannya.

Selain untuk memenuhi tuntutan keadilan sosial ini memungkinkan berlangsungnya pembangunan dan perdagangan antar daerah (pulau) yang berimbang. Hal ini mendorong terwujudnya "spesialisasi daerah", yang berarti pula membuka kesempatan yang lebih besar bagi masing-masing daerah untuk berkembang dan bertumbuh lebih maju. Kedua, terwujudnya keseimbangan antar daerah (pulau) berarti pula bahwa kesatuan ekonomi dari wilayah daratan kepulauan dan perairan menjadi lebih kokoh.



### 3.2. Identifikasi Sektor Unggulan Per Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara

Pengembangan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara mengacu pada sektor yang memiliki kriteria unggulan. Penentuan potensi unggulan menggunakan analisis SLQ dan DLQ yang menghasilkan komoditas unggulan di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut (Dokumen MP3EI Provinsi Maluku Utara):

1. Halmahera Barat memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian, terutama tanaman pangan yaitu ubi jalar, ubi kayu dan jagung. Komoditas unggulan untuk subsektor perkebunan meliputi kakao, kelapa dan cengkeh.
2. Halmahera Selatan memiliki komoditas unggulan di sektor industri pengolahan dan perdagangan hotel-restoran. subsektor yang menjadi unggulan adalah industri pengolahan tanpa migas berupa industri pengolahan kayu dan industri pengolahan hasil perikanan tuna dan cakalang. Untuk subsektor perdagangan hotel-restoran yang unggul terutama restoran.
3. Halmahera Tengah memiliki sektor unggulan di sektor pertanian, bangunan dan jasa. Subsektor yang menjadi unggulan subsektor perkebunan adalah kakao, kopi dan cengkeh.
4. Halmahera Timur memiliki subsektor unggulan di sektor pertambangan. Komoditas unggulannya terutama adalah nikel.
5. Halmahera Utara memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian dan perdagangan hotel-restoran. Komoditas unggulan yang dihasilkan terutama subsektor tanaman pangan dan perkebunan masing-masing meliputi ubi kayu, jagung, kedelai, kelapa, kakao, lada dan pala.
6. Kepulauan Sula memiliki komoditas unggulan di sektor pertanian, perdagangan dan listrik. Komoditas subsektor perikanan yang menjadi unggulan adalah ikan tuna dan cakalang. Sedangkan komoditas unggulan subsektor perkebunan meliputi kopra dan cengkeh.
7. Morotai memiliki sektor unggulan terutama pertanian dan perdagangan, dengan subsektor unggulan perikanan dan restoran. Komoditas unggulan di subsektor perikanan, yaitu

- jenis ikan pelagis (tuna, cakalang, teri, kembung) dan ikan demersal (kakap, baronang).
8. Ternate memiliki komoditas unggulan di sektor bangunan dan pengangkutan-komunikasi. Subsektor yang menjadi unggulan adalah bangunan dan angkutan jalan raya.
  9. Tidore memiliki komoditas unggulan di sektor perdagangan hotel-restoran. Produk subsektor yang menjadi unggulannya adalah produk perdagangan besar dan eceran.

**B. KONDISI UMUM PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor atas 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Seperti pada gambar dibawah ini.



Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, memiliki tujuan pokok yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya alam maupun sumber daya manusia demi

menciptakan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara yang lebih baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat banyak persoalan-persoalan baik dari sisi tata kelola Pemerintahan, tata kelola keuangan dan persoalan eksternal Pemerintahan yang berimplikasi pada kualitas pelayanan.

## 1. SUMBER DAYA APARATUR

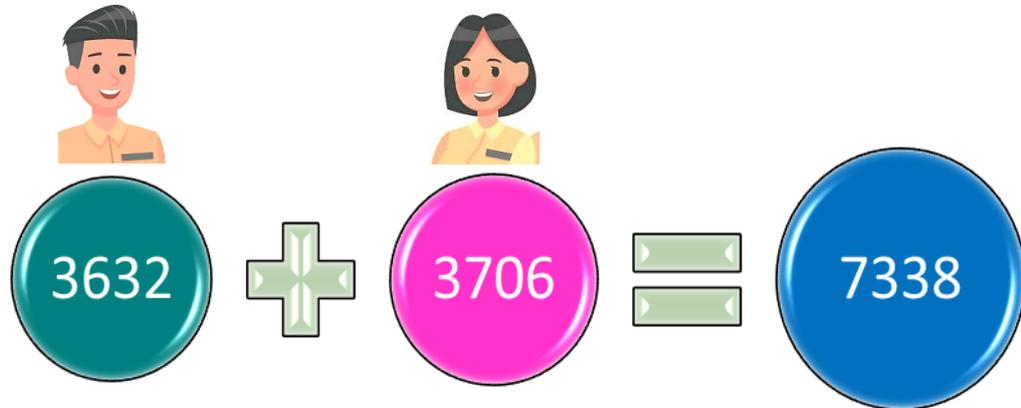
### A. Komposisi ASN 4 (Empat) Tahun Terakhir

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas dan fungsi Pemerintahan agar terciptanya sistem pemerintahan yang *good governance* maka di perlukan adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Terkait dengan Penyajian Data Base Kepegawaian Provinsi Maluku Utara, maka terlebih dahulu disajikan peta kekuatan ASN Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir yaitu sebagaimana tergambar pada Grafik dibawah ini :



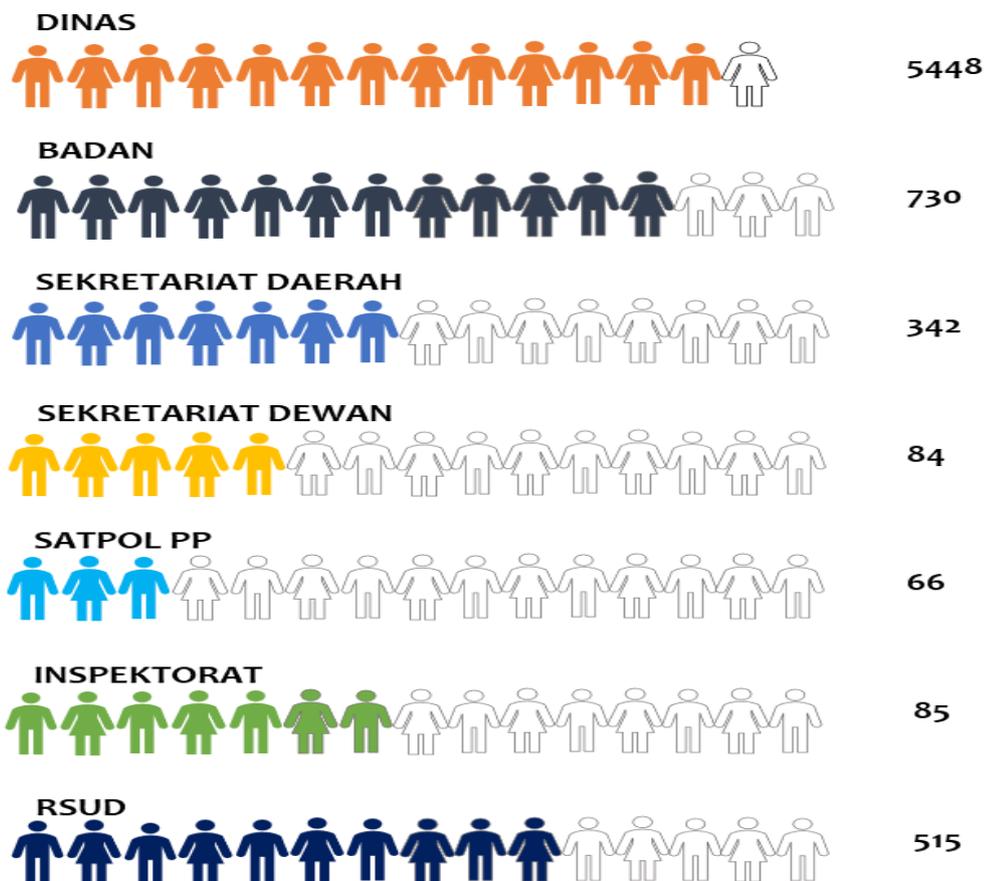
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

**B. Komposisi perbandingan ASN berdasarkan jenis kelamin.**



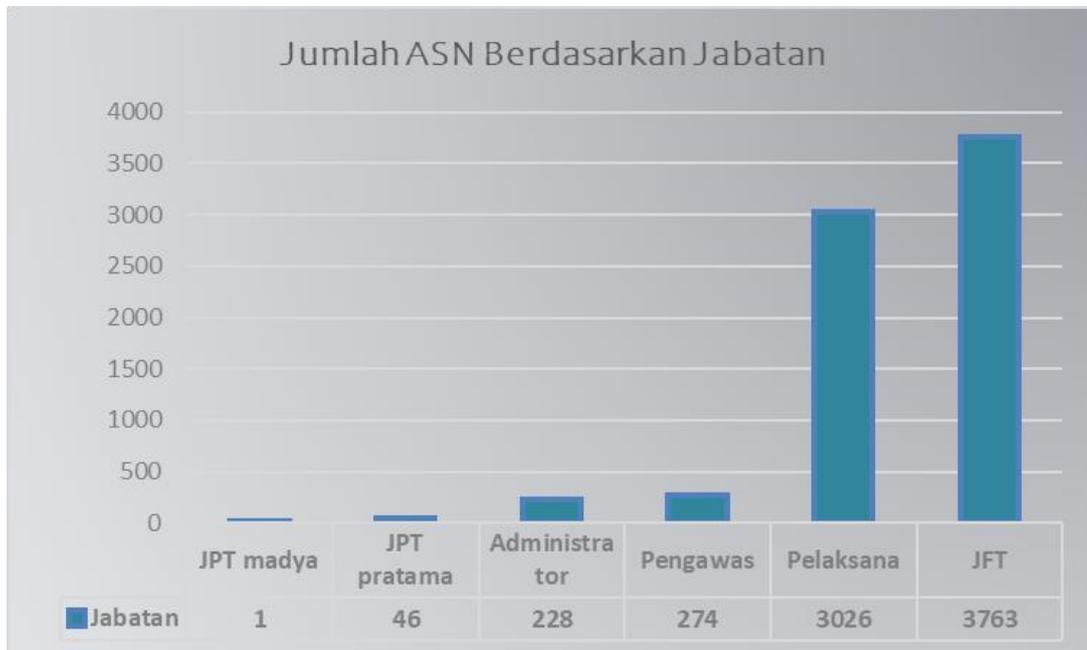
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2023

**C. Sebaran ASN Berdasarkan Perangkat Daerah**



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2023

**D. Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan**



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2023

**E. Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber : BKD Provinsi Maluku Utara 2023

### E. Komposisi ASN berdasarkan Kepercayaan/Agama



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah



## BAB II

# PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan dan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Berikut disajikan secara ringkas Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta keterkaitan dokumen perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2022.

### A. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

#### 1. VISI

Dengan menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025 dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Maluku Utara yang Damai, Maju, Mandiri, Adil, dan Sejahtera yang berorientasi Sumber Daya laut dan kepulauan” serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dinamika dan isu-isu strategis yang ada, maka visi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 adalah:



## “MALUKU UTARA SEJAHTERA 2024”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifanlokal.

**Maluku Utara Maju**, mengandung arti mewujudkan kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial



dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayahkepulauan.

***Maluku Utara Agamis dan Harmonis***, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong terciptanya Maluku Utara yang agamis, aman dan damai danharmonis.

***Maluku Utara Tumbuh Ekonominya***, mengandung arti mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi di masadepan.

***Maluku Utara Reformis dan Adil***, mengandung arti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

## 2. MISI

Dalam rangka mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
3. Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

## 3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka perlu ada kerangka yang jelas terkait tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai sehingga pelaksanaan urusan Pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan dan administrasi pemerintahan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan berjalan terarah. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi dan misi. Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020-2024.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya pada setiap misi sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel .2.1

SKEMA MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (Tujuan/Sasaran)	TARGET 2023
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif		Indeks Pembangunan Manusia	69,72
				Indeks Pembangunan Gender	90,01
			Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	6,25
		Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,52
			Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya		
2	Meningkatkan Efisiensi Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas dan Pengembangan Wilayah	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau		Indeks Pembangunan Infrastruktur*	75,42
			Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau		
		Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah		Indeks Perkembangan Wilayah	59,79



			Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,729
3	Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,94
4	Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan		Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	12,60
				Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen)	26,63
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,62
			Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	30,74
			Indeks Rasio Gini	0,285	
			Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	143,71	
5	Memantapkan Tatakelola	Mewujudkan pemerintahan yang		Indeks Reformasi Birokrasi	54,34



	Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan	bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	41,24

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	persen	6,25
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya			
3	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau			
4	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks	0,729
5	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			
6	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)		30,74
		Indeks Rasio Gini	ndeks	0,285
7	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim			
8	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	ndeks	41,24



---

## B. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

---

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KH. Abdul Gani Kasuba, Lc**

Jabatan : **Gubernur Maluku Utara**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sofifi, 08 Februari 2023

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc**

Tabel .2.2  
 Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara  
 Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis 1</b>		
<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1.1 Indeks Kesehatan	Indeks	74,40
<b>Sasaran Strategis 2</b>		
<b>Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasana kebudayaan daerah</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
2.1 Indeks Pendidikan	Indeks	75,70
2.2 Indeks apresiasi kebudayaan daerah	Indeks	180
<b>Sasaran Strategis 3</b>		
<b>Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
3.1 Indeks peran dan produktifitas pemuda h	Nilai	75,0
<b>Sasaran Strategis 4</b>		
<b>Meningkatnya kualitas perempuan dan anak</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
4.1 Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,68
<b>Sasaran Strategis 5</b>		
<b>Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
5.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,1
<b>Sasaran Strategis 6</b>		
<b>Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
6.1 Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	Nilai	86,51
<b>Sasaran Strategis 7</b>		
<b>Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah</b>		
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
7.1 Indeks Konektifitas Wilayah	Indeks	48,77

**Sasaran Strategis 8****Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah**

Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1 Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks	0,261

**Sasaran Strategis 9****Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan**

Indikator Kinerja	Satuan	Target
9.1 Indeks Toleransi	Indeks	87,50

**Sasaran Strategis 10****Meningkatnya keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat**

Indikator Kinerja	Satuan	Target
10.1 Indeks Kriminalitas	Indeks	40,52

**Sasaran Strategis 11****Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan**

Indikator Kinerja	Satuan	Target
11.1 Indeks Kemandirian Pangan	Indeks	2,25
11.2 Nilai Tukar Petani	Nilai	100,25
11.3 Nilai Tukar Nelayan	Nilai	105,70

**Sasaran Strategis 12****Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif**

Indikator Kinerja	Satuan	Target
12.1 Perkembangan share industri manufaktur		9,13
12.2 Perkembangan share industri pariwisata		0,52
12.3 Tingkat Pengangguran Terbuka		4,39

**Sasaran Strategis 13****Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah**

Indikator Kinerja	Satuan	Target
13.1 Tingkat Inflasi		1,9-3,1
13.2 Perkembangan Nilai Ekxport		1.014,30
13.3 Perkembangan Net Ekspor antar daerah		-5,50

**Sasaran Strategis 14**

Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Target
14.1 Tingkat kemiskinan	Persentase	5,71
14.2 Pertumbuhan industri Mikro dan Kecil	Persentase	16,50
14.3 Pengeluaran perkapita Riil	Persentase	9.335,5

**Sasaran Strategis 15**

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim

Indikator Kinerja	Satuan	Target
15.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	88,31
15.2 Tingkat kerentanan Perubahan Iklim		66,00

**Sasaran Strategis 16**

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target
16.1 Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Indeks	78,60
16.2 Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	Indeks	72,67

**Sasaran Strategis 17**

Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target
17.1 Indeks Demokrasi	Indeks	75,89

Tabel 2.3

Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara  
Tahun 2023 setelah RPJMD Perubahan

**Sasaran Strategis 1**

Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1 Tingkat Kemiskinan	Persen	6,25

**Sasaran Strategis 2**

Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1	-	-	-

**Sasaran Strategis 3**

Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1	-	-	-

**Sasaran Strategis 4**

Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.1	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks	0,729

**Sasaran Strategis 5**

Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1	-	-	-

**Sasaran Strategis 6**

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	Jumlah	30,74
6.2	Indeks Gini Rasio	Poin	0,285

**Sasaran Strategis 7**

Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
--	-------------------	--------	--------

7.1

**Sasaran Strategis 8**

**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif**

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	41,24

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan capaian target Kinerja pada tahun 2023 tersebut telah menyiapkan APBD Tahun 2023 dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp 4.242.669.820.080** bersumber dari pendapatan Asli daerah.

**Tabel.2.5**

Rincian Pagu Anggaran Organisasi Perangkat Daerah  
Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu (Milyar Rupiah)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	962.153.684.656
2	Dinas Kesehatan	246.695.110.313
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	727.486.971.138
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	165.728.053.217
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.759.879.885
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.225.010.233
7	Dinas Sosial	20.932.310.788
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85.769.277.532
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.452.831.660
10	Dinas Pangan	17.961.698.560
11	Dinas Lingkungan Hidup	14.098.781.135
12	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.493.715.000
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.242.293.175
14	Dinas Perhubungan	28.607.360.589
15	Dinas Komunikasi dan Informatika dan	13.060.743.150



	Persandian	
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.076.953.265
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.519.348.655
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39.218.003.465
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25.803.683.800
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	123.186.158.964
	Dinas Pariwisata	14.956.286.975
21	Dinas Pertanian	90.791.813.994
22	Dinas Kehutanan	50.890.141.149
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21.083.255.435
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.027.267.654
25	Inspektorat Daerah	31.178.763.841
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32.741.279.030
27	Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah	444.786.361.471
28	Badan Kepegawaian Daerah	14.203.919.920
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.345.958.977
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.687.297.820
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.435.885.000
33	Sekretariat Daerah	257.691.484.438
34	Sekretariat DPRD	172.060.006.700
35	Badan Penghubung	13.174.011.705
36	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.470.477.940
37	Badan Pendapatan Daerah	71.889.048.500
	<b>TOTAL</b>	<b>3.024.282.572.000</b>

Sumber: BPKAD Provinsi Maluku Utara 2023

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Maluku Utara berada pada nilai 63,04 dengan tingkat akuntabilitas kinerja **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil pada pemerintah provinsi maluku utara sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan adapun rincian penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

KOMPONEN		BOBOT	NILAI
			2022
A	PERENCANAAN KINERJA	30	24,80
B	PENGUKURAN KINERJA	30	15,33
C	PELAPORAN KINERJA	15	9,84
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	13,07
NILAI HASIL EVALUASI		100	63,04
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			<b>B</b>

Dari hasil evaluasi kinerja diatas berikut ditampilkan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dalam upaya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2022



No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pada kerangka logis yang telah disusun pada level individu, sebagaimana yang diatur dalam PERMEN PANRB No 89 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Telah dilakukan Reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan dengan melakukan perubahan pada RPJMD, serta dilakukan sosialisasi dan asistensi penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) ke PD lingkup Pemprov Maluku Utara	Biro Organisasi	Telah dilaksanakan
2	Melakukan reviu atas keselarasan antar kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dengan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan	Telah dilakukan reviu keselarasan antar program/kegiatan/sub kegiatan	Biro organisasi, Inspektorat, Bappeda	Telah dilaksanakan
3	Melakukan evaluasi internal SAKIP seluruh PD serta memonitor tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya	Evaluasi Internal SAKIP telah dilakukan oleh inspektorat ke seluruh PD lingkup Provinsi Maluku Utara	Biro Organisasi, Inspektorat	Telah dilaksanakan
4	Menumbuhkan rasa kepemilikan kepada seluruh pimpinan pada tiap jenjang organisasi, dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang dilakukannya, serta memberikan reward and punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja	Perjanjian Kinerja PD telah dibuat dari level eselon II, III, IV sampai jabatan pelaksana, dan dilakukan evaluasi kinerja kepada pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai dasar pemberian reward and punishment	Biro Organisasi	Telah dilaksanakan
5	Memprioritaskan penghapusan strategi (program/kegiatan/sub kegiatan) yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah, dengan kata lain, aktifitas yang dilakukan sebagai upaya pencapaian kinerja bukanlah aktifitas yang sama setiap tahunnya	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas di fukuskan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah	Bappeda, BPKAD	Telah dilaksanakan
6	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD	Kapasitas evaluator AKIP sudah memadai dalam menggunakan instrumen evaluasi, serta mampu menerapkan professional judgement dalam memberikan rekomendasi perbaikan akuntabilitas kinerja PD	Inspektorat	Telah dilaksanakan
7	Setiap pimpinan pada setiap level organisasi menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP, Baik yang diterbitkan oleh Inspektorat, maupun oleh Kementerian PANRB	Setiap PD sudah menindaklanjuti LHE AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat maupun Kementerian PANRB	Seluruh PD Provinsi Maluku Utara	Telah dilaksanakan



## B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah.

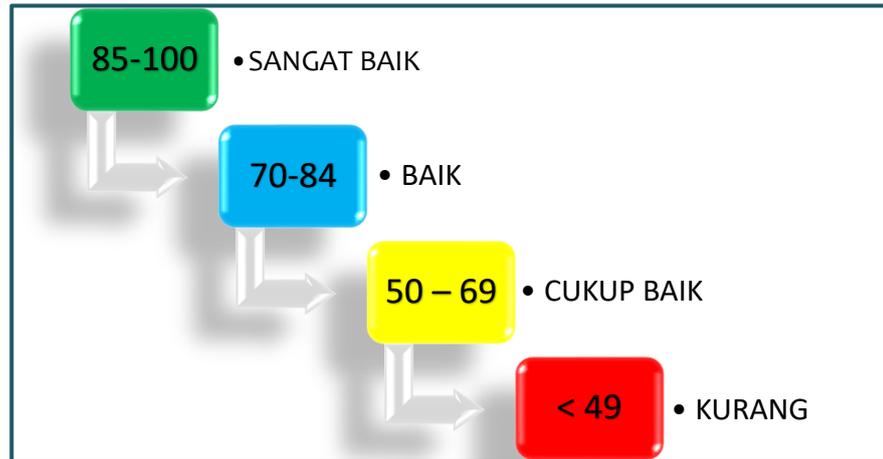
Dengan mengacu pada aturan tersebut, metode yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja tetap menggunakan metode perbandingan capaian kinerja. Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis baik terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) maupun terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran dimulai dari pengukuran kinerja yang telah rencanakan sebelumnya, kemudian atas rumusan capaian kinerja tersebut maka dilakukan analisis keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pada setiap sasaran.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara indikator yang telah dicapai dan yang belum mencapai target. Dengan demikian dalam uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini hanya menguraikan gambaran umum capaian kinerja dari

setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :



Dengan menggunakan rumus pengukuran capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ket: semakin tinggi realisasi kinerja semakin tinggi capaian kinerja organisasi dan sebaliknya.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ket: semakin rendah realisasi kinerja semakin tinggi capaian kerja organisasi dan sebaliknya



### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

---

Analisis capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah. Hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 tidak lepas dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan lainnya yaitu :

- **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** Provinsi Maluku Utara tahun 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- **Dokumen Perjanjian Kinerja** Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Januari 2024.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Maluku Utara yang dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2022, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pencerminan dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024 maka analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**MISI PERTAMA  
 MEMBANGUN SUMBER DAYA  
 MANUSIA YANG SEHAT,  
 CERDAS DAN BERBUDAYA**

Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian Misi tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.1  
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2023**

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan
	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	

Capaian kinerja dari indikator sasaran pada misi pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya sebagaimana tabel tersebut diatas pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,25	6,46	96,64
3	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	*		*	*	*
<b>Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>96,64</b>

Capaian Kinerja dari Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan adalah 96,64 atau berpredikat **“SANGAT BAIK”**.

Untuk Sasaran Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan yang Memperkuat Ketahanan Budaya, Warisan Budaya dan Literasi Budaya tidak memuat indikator sasaran didalam RPJMMDP Tahun 2020-2024 dan hanya memiliki indikator tujuan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja untuk sasaran tersebut.

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Pertama di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka capaian kerjanya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2022-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,97	6,46	Naik
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	*	*	*	*	*
<b>Realisasi Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>6,97</b>	<b>6,46</b>	<b>Naik</b>

Berdasarkan tabel 3.4 sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk Sasaran Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan yang Memperkuat Ketahanan Budaya, Warisan Budaya dan Literasi Budaya tidak memuat indikator sasaran didalam RPJMDP Tahun 2020-2024 dan hanya memiliki indikator tujuan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya untuk sasaran tersebut.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran pada Misi Pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Startegis pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2021 s/d 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,06	6,89		5,71	6,37		6,25	6,46	96,64
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Realisasi Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022 s/d 2023</b>					<b>6,89</b>			<b>6,37</b>			<b>6,46</b>	

Realisasi kinerja Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif periode Tahun 2021 sampai pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023. Untuk Sasaran Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan yang Memperkuat Ketahanan Budaya, Warisan Budaya dan Literasi Budaya tidak memuat indikator sasaran didalam RPJMMDP Tahun 2020-2024 dan hanya memiliki indikator tujuan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 untuk sasaran tersebut.

Capaian kinerja Sasaran pada Misi Pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMMDP tahun 2020-2024 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

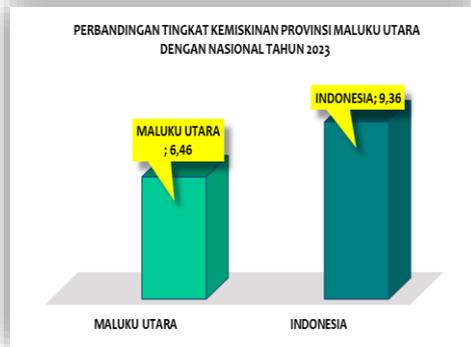
**Tabel 3.6**  
**Realisasi Kinerja Sasaran pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Terhadap RPJMDP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target RPJMDP	Capaian (%)
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,46	6,19	104,362
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	*	*	*	*	*
<b>Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Pertama terhadap Target akhir RPJMD 2020-2024</b>				<b>6,46</b>		<b>104,362</b>

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Pertama terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja dari Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif belum sepenuhnya target akhir RPJMDP 2020-2024. Untuk Sasaran Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan yang Memperkuat Ketahanan Budaya, Warisan Budaya dan Literasi Budaya tidak memuat indikator sasaran didalam RPJMDP Tahun 2020-2024 dan hanya memiliki indikator tujuan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMDP Tahun 2020-2024 untuk sasaran tersebut.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja provinsi maluku utara maka perlu dilakukan perbandingan beberapa indikator kinerja dengan capaian nasional dan provinsi lain diantaranya:

**Perbandingan Indikator Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dengan Capaian Nasional**



Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 sudah berada di atas angka Nasional. Begitu juga bila dibandingkan dengan kondisi tiga tahun terakhir tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah berada di atas angka Nasional.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Pertama Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

**Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama**

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BAPPEDA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.788.793.487
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.433.333.015
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	236.882.808
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	199.995.369



	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	198.868.653
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	299.780.929
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	412.115.672
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	146.170.527
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	302.839.338
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.636.679.719
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>1 PROGRAM</b>	<b>10.788.793.487</b>
<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>1.171.802.680</b>
	<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>	<b>42.222.970</b>
	Pengangkatan Anak antar WNI	42.222.970
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>1.129.579.710</b>
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	448.214.160
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	380.767.550
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	300.598.000
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>1 PROGRAM</b>	<b>1.171.802.680</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>2 PROGRAM</b>	<b>11.960.596.167</b>

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama melalui



Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 2 Program 3 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 11.960.596.167 (0,28%)** dari total APBD tahun 2023.

Meningkatnya Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama tidak terlepas dari beberapa faktor keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama pada indikator Tingkat Kemiskinan yang nilai realisasi kinerjanya meningkat diantaranya:

1. Adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka menguatkan peran dari TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan juga aksi berupa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Selain faktor keberhasilan terdapat juga faktor penghambat dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama yang terdapat pada beberapa indikator diantaranya:

1. Masih tingginya tingkat kesenjangan yang dirasakan oleh Masyarakat Provinsi Maluku Utara terutama di wilayah lingkaran tambang dimana menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di tahun 2023 berada diangka 25,13%, Pertumbuhan ekonomi yang impresif itu tidak terlepas dari sumbangan besar pertambangan Nikel di Maluku Utara. tiga Kabupaten penyumbang terbesar pertambangan Nikel di Maluku Utara adalah Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Ketiganya sama-sama menghasilkan Nikel, tetapi dua daerah terakhir masih berjibaku menghadapi kemiskinan dan ketimpangan.
2. Porsi APBD yang di belanjakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara belum tepat sasaran dimana 26,25% anggaran dari total belanja di peruntukan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN



sedangkan untuk Pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur hanya 12% dari total belanja.



Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dan indikator kinerja dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.31**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2023**

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	
	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah

Misi Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada 2 (dua) sasaran yakni : Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau, dan Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk tahun 2023.

**Tabel 3.33**  
**Capaian Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	*	*	*	*	*
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Persen	0,729	1,038	57,61
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>						<b>57,61</b>

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan indikator Indeks Ketimpangan Wilayah adalah sebesar 57,61 persen atau dengan predikat **“CUKUP BAIK”**. Sedangkan sasaran terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau tidak dapat diukur realisasi dan capaian

kinerjanya karena indikator dari sasaran tersebut tidak termuat di dalam RPJMDP Tahun 2020-2024.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran pada Misi Kedua tahun 2023, maka perlu dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk melihat progresivitas dari kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.34**

**Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2022 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	*	*	*	*	*
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Persen	0,303	1,038	Turun
<b>Realisasi Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>0,303</b>	<b>1,308</b>	<b>Turun</b>

Perbandingan realisasi kinerja sasaran pada Misi Kedua dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya diangka 1,308 persen.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk beberapa tahun terakhir, maka hasil capaian kinerja sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.35  
Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan  
Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Periode 2021s/d2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Persen	0,262	0,363	-37,9	0,261	0,303	-15,8	0,729	1,308	57,61
<b>Realisasi kinerja sasaran strategis 2020-2022</b>					0,363			0,303			1,308	

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan dua tahun sebelumnya untuk realisasi kinerja sasaran pada Misi Kedua Mengkaselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah mengalami penurunan diangka 1,308 persen dari dua tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target RPJMDP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 maka tingkat ketercapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.36  
Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan  
Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Terhadap  
Target RPJMD Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	*	*	*	*	*
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Persen	1,308	0,722	57,20
<b>Realisasi Kinerja Sasaran Strategis misi ke Dua terhadap Target akhir RPJMD 2020-2024</b>				<b>1,308</b>		<b>57,20</b>

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kedua terhadap target akhir RPJMD tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja dari indikator indeks ketimpangan wilayah belum mencapai target akhir RPJMD 2020-2024.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Kedua Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	417.199.289.398
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	417.199.289.398
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan	2.863.220.000



	Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	999.941.910
	Pembangunan Jalan	297.695.748.666
	Rekonstruksi Jalan	83.029.135.488
	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.045.684.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	986.270.000
	Pembangunan Jembatan	2.023.638.000
	Penggantian Jembatan	5.830.233.600
	Rehabilitasi Jembatan	495.960.000
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	19.229.457.734
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>1 PROGRAM</b>	<b>417.199.289.398</b>
<b>DINAS PERUMAHAN &amp; KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>6.241.435.000</b>
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	389.455.000
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	257.501.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	131.953.500
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.596.920.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.596.920.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>49.025.383.290</b>
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	142.801.840.977
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5.920.930.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	136.515.241.977
	Koordinasi dan Sinkronisasi	365.669.000



	dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>2 PROGRAM</b>	<b>55.266.818.290</b>
<b>DINAS ENERGI &amp; SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>2.962.916.000</b>
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	945.408.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	945.408.000
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.017.508.000
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	501.596.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.515.912.000
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>1 PROGRAM</b>	<b>2.962.916.000</b>
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>2.021.727.000</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.445.838.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.445.838.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	54.890.000
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	54.890.000
	Persetujuan Hasil Analisis	193.757.000



<b>Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	193.757.000
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>220.352.000</b>
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	220.352.000
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>106.890.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	106.890.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>15.108.136.990</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</b>	<b>199.520.100</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	199.520.100
<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>149.999.400</b>
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan	149.999.400



	Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>	931.337.300
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	931.337.300
	<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	200.000.080
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	200.000.080
	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	13.327.280.000
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	13.327.280.000
	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam</b>	300.000.110



	DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Regional	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Regional	300.000.110
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>2 PROGRAM</b>	<b>17.129.863.990</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>5 PROGRAM</b>	<b>506.725.835.668</b>

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 5 Program, 17 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 506.725.835.668 (11,94%)** dari total APBD tahun 2023.

Meningkatnya Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua tidak terlepas dari beberapa faktor keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama pada indikator yang nilai realisasi kinerjanya meningkat diantaranya:

Meningkatnya indeks ketimpangan wilayah Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi terutama di wilayah atau daerah yang mempunyai perusahaan tambang tapi berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang tidak memiliki potensi pertambangan sehingga terjadinya ketimpangan dari sisi pendapatan daerah dan infrastruktur.

Selain faktor keberhasilan ada juga faktor penghambat dalam pengukuran Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua adalah terdapat Sasaran yang tidak memiliki indikator sasaran dan hanya mempunyai indikator Tujuan yang termuat didalam RPJMDP.



Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai Dan Harmonis, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.50**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2023**

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*

Misi Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada satu sasaran yakni : Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan. Pencapaian kinerja pada sasaran tersebut tidak dapat diukur karena indikator sasarannya tidak termuat didalam RPJMDP 2020-

2024 dan hanya memuat indikator Tujuan dari Misi Ketiga:

**Tabel 3.52**  
**Capaian Kinerja Sasaran Misi Ketiga Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*	*	*	*	*
Capaian indikator sasaran						*

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga tahun 2023 tidak dapat di ukur karena indikator sasaran tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024. Capaian kinerja Sasaran pada Misi Ketiga untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 3.53**  
**Perbandingan Sasaran Kinerja Misi Ketiga Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2022 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*	*	*	*	*
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2022-2023				*	*	*

Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan tidak dapat diukur perbandingan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya karena untuk indikator sasarannya di tahun 2023 tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 sedangkan untuk tahun 2022 masih menggunakan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD induk yang mana berbeda dengan RPJMDP 2020-2024.

Adapun capaian kinerja Sasaran pada Misi Ketiga tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir maka capaiannya adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel. 3.54**  
**Perbandingan Sasaran Misi Ketiga Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2020- 2022**

No	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2021-2023</b>					*			*			*	

Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan tidak dapat diukur perbandingan tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya karena untuk indikator sasarnya di tahun 2023 tidak termuat didalam RPJMMD 2020-2024 sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 masih menggunakan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD induk yang mana berbeda dengan RPJMMD 2020-2024.

Capaian kinerja dari Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMMD tahun 2020 – 2024 maka hasilnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.55**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Misi Ketiga Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2023 Terhadap RPJMMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*	*	*	*	*
<b>Perbandingan realisasi kinerja sasaran dengan RPJMD 2020-2024</b>				*		*

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Ketiga terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator dari Sasaran pada misi ketiga tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan target akhir RPJMDP 2020-2024 karena indikator sasarannya tidak termuat didalam target akhir RPJMDP.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>		
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>		
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>		
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi faktor pendukung meningkatnya capaian kinerja untuk indikator sasaran terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan belum dapat dijabarkan karena tidak ada indikator untuk sasaran tersebut didalam RPJMDP 2020-2024.



Faktor penghambat dalam pengukuran capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan adalah sasaran tersebut tidak memiliki indikator sasaran di dalam RPJMDP 2020-2024 sehingga diharapkan kedepannya terdapat perbaikan dalam penentuan indikator sasaran RPJMDP 2020-2024.



Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.62**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2022**

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan Per Kapita (Juta) Indeks Gini Rasio
	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*

Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada 2 (dua) sasaran yakni : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja,

meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan, Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim dari sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk tahun 2022. Indikator dan capaian kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

**1.1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan**

Berdasarkan RPJMDP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 untuk sasaran Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.63**  
**Indikator Kinerja dari Sasaran Startegis 1 Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan Per Kapita (juta)
	Indeks Gini Rasio

Capaian kinerja sasaran strategis 1 untuk Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebagaimana tabel tersebut diatas jika dibandingkan antara target dan realisasi di tahun 2023, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.64**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1 Misi Ke empat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita ( Rp.juta)	Jumlah	30,74	36,27	117,9
		Indeks Gini Rasio	Poin	0,285	0,300	105,6
<b>Capaian Kinerja Sasaran 1 Misi Keempat</b>					<b>18,29</b>	<b>111,75</b>

Capaian kinerja sasaran 1 pada Misi Ke empat Tahun 2023 berada diangka sebesar **111,75** persen dengan berpredikat **“SANGAT BAIK”**.

Capaian kinerja untuk sasaran 1 pada Misi Keempat untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka capaian kerjanya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.65**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 1 Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2022 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas	Pendapatan per Kapita ( Rp.juta)	Jumlah	*	36,27	-
		Indeks Gini Rasio	Poin	*	0,300	-

kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan					
<b>Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Tahun Sebelumnya</b>			*	18,29	-

Realisasi kinerja sasaran 1 pada Misi Ke empat Tahun 2023 tidak dapat diukur perbandingannya dengan tahun 2022 karena indikator sasaran tahun 2022 berbeda dengan indikator sasaran tahun 2023.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran 1 pada Misi Keempat untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir maka capaiannya adalah sebagaimana tergambar pada table berikut :

**Tabel. 3.66**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 1 Misi Kelima Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2021 s/d 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita ( Rp.juta)	Jumlah	*	*	*	*	*	*	30,74	36,27	117,9
		Indeks Gini Rasio	Poin	*	*	*	*	*	*	0,285	0,300	105,6
<b>Realisasi capaian kinerja sasaran 1 tahun 2021 s/d 2023</b>					-			-		18,26		

Realisasi kinerja sasaran 1 pada Misi Ke empat Tahun 2023 tidak dapat diukur perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya karena indikator sasaran tahun 2021 dan 2022 berbeda dengan indikator sasaran

tahun 2023.

Capaian kinerja dari sasaran 1 pada Misi Keempat terhadap target akhir RPJMD tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.67**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 1 Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Terhadap RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024**

No		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita ( Rp.juta)	Jumlah	36,27	33,10	109,59
		Indeks Gini Rasio	Poin	0,300	0,278	1,08

Realisasi kinerja sasaran 1 pada Misi Ke empat Tahun jika dibandingkan dengan target RPJMDP 2020-2024 untuk indikator pendapatan perkapita sudah memenuhi target RPJMDP diangka **36,27 (Juta)** dimana target akhir RPJMDP 2020-2024 berada diangka **33,10(Juta)**. Sedangkan indikator Indeks Gini Rasio realisasi kinerjanya masih dibawah

target akhir dari RPJMDP 2020-2024 diangka **0,300** dimana target akhir RPJMDP 2020-2024 untuk indikator Indeks Gini Rasio adalah **0,278**.

**1.2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 untuk sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.69**  
**Indikator Kinerja dari Sasaran 2 Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*

Capaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tabel tersebut diatas jika dibandingkan antara target dan realisasi di tahun 2023, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.70**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2 Misi keempat Membangun Perekonomian Daerah**  
**Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan**  
**Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*	*	*	*	*
<b>Realisasi Capaian Kinerja Sasaran strategis 2</b>						

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi Keempat tahun 2023 tidak dapat di ukur karena indikator sasaran tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024.

Capaian kinerja untuk sasaran 2 Misi Keempat untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka capaian kerjanya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.71**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Misi keempat Membangun Perekonomian**  
**Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai**  
**Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**  
**Tahun 2022 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*	*	*	*	*
<b>Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2</b>						

Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim tidak dapat diukur perbandingan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya karena untuk indikator sasarannya di tahun 2023 tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 sedangkan untuk tahun 2022 masih menggunakan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD induk yang mana berbeda dengan RPJMDP 2020-2024.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran 2 Misi Keempat tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir maka capaiannya adalah sebagaimana tergambar pada table berikut :

**Tabel. 3.72**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Misi keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2021– 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Capaian kinerja sasaran strategis 2 tahun 2021-2023</b>												

Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim tidak dapat diukur perbandingan tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya karena untuk indikator sasarannya di tahun 2023 tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 masih menggunakan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD induk yang mana

berbeda dengan RPJMDP 2020-2024.

Perbandingan capaian kinerja dari sasaran 2 Misi Keempat dengan target akhir RPJMDP tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.73**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Misi keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Terhadap RPJMDP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*	*	*	*	*
	Realiasi kinerja sasaran strategis 2 terhadap RPJMDP					

Realisasi Kinerja Sasaran 2 Misi Keempat terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator dari Sasaran pada Misi Keempat tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan target akhir RPJMDP 2020-2024 karena indikator sasarannya tidak termuat didalam target akhir RPJMDP.

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Keempat Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :



PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BIRO PEREKONOMIAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	499.999.400
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	499.999.400
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	499.999.400
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>1 PROGRAM</b>	<b>499.999.400</b>
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.139.699.900
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	255.208.700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	255.208.700
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.718.106.150
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	252.730.000
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.465.376.150
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	166.385.050
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	166.385.050



	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>799.859.803</b>
	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>499.999.303</b>
	Verifikasi Mutu Produk	499.999.303
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>299.860.500</b>
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	299.860.500
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>301.801.650</b>
	<b>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</b>	<b>106.814.000</b>
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	106.814.000
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>194.987.650</b>
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	194.987.650
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>3 PROGRAM</b>	<b>5.241.361.353</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>4 PROGRAM</b>	<b>5.741.360.753</b>

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Keempat Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 4 Program, 8 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.741.360.753 (0,14%)** dari total APBD tahun 2023.



Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.87**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2023**

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah

Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada 1 (satu) sasaran yakni : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif, dari sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk tahun 2023. Capaian kinerja sasaran pada Misi Ke Lima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.89  
Capaian Kinerja Sasaran Misi Ke Lima Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Poin	41,24	56,75	137,61
Capaian kinerja sasaran pada misi ke Lima tahun 2023						137,61

Realisasi capaian kinerja sasaran pada Misi Kelima tahun 2022 sebesar 137,61% atau berpredikat **“SANGAT BAIK”**.

Capaian kinerja untuk sasaran pada Misi Kelima jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.90  
Realisasi Kinerja Sasaran Misi Ke Lima Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2022 – 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Poin	33,11	56,75	Naik
Realisasi kinerja sasaran pada misi ke lima tahun 2022-2023				33,11	56,75	Naik

Realisasi Kinerja sasaran pada Misi Kelima mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran pada Misi Kelima

dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir maka capaiannya adalah sebagaimana tergambar pada table berikut :

**Tabel. 3.91**  
**Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Misi Ke Lima Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2021 – 2022**

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Rea lisasi	%	Target	Rea lisasi	%	Target	Rea lisasi	%
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah					30,55	33,11	08,38	41,24	56,75	137,61
<b>Realisasi capaian kinerja sasaran pada misi ke lima tahun 2020-2022</b>								<b>33,11</b>			<b>56,75</b>	

Realisasi kinerja sasaran pada Misi Kelima dari data 3 tahun terakhir terjadi peningkatan pada Indikator Indeks Inovasi Daerah. Capaian kinerja dari sasaran pada Misi Kelima jika dibandingkan dengan target akhir RPJMDP tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.92**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Misi Ke Lima Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Terhadap RPJMDP Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Poin	56,75	60,63	93,60
<b>Realisasi kinerja sasaran pada misi ke lima terhadap RPJMDP 2020-2024</b>				<b>56,75</b>		<b>93,60</b>

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kelima terhadap RPJMD tahun 2020 – 2024 untuk masing – masing indikator kinerja utama belum mencapai target yang di tetapkan oleh RPJMDP.



Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Kelima Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>8.421.779.140</b>
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>1.346.495.950</b>
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	449.500.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	496.995.900
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	400.000.050
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>1.403.541.750</b>
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	419.226.000
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	384.017.650
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	500.298.000
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	100.000.100
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>2.073.863.540</b>
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	499.344.050
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian	473.752.050



	dan Perdagangan	
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	216.247.390
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	455.718.050
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	428.802.000
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>3.597.877.900</b>
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.465.849.350
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1.178.132.100
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	458.915.700
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	494.980.750
<b>TOTAL PROGRAM &amp; ANGGARAN</b>	<b>1 PROGRAM</b>	<b>8.421.779.140</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>1 PROGRAM</b>	<b>8.421.779.140</b>

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kelima melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 1 Program, 4 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.421.779.140 (0,20%)** dari total APBD tahun 2023.

### C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jika dilihat dari alokasi anggaran per Misi alokasi anggaran terbesar terdapat pada Misi Kedua, **Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah** yaitu sebesar 11,94 % dari total APBD tahun 2022. Sedangkan alokasi anggaran terkecil berada pada Misi

Keempat *Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan* sebesar 0,14% dari total APBD tahun 2023.



Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa sebagian besar sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih besar daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program belum tercapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih besar daripada yang ditargetkan dan juga lebih besar daripada realisasi capaian kinerjanya.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan laporan kinerja ini setidaknya memiliki 2 (dua) fungsi yaitu bagi internal organisasi sebagai media untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan bagi masyarakat diharapkan sebagai sarana untuk menilai kualitas penyelenggara pemerintahan sebagai pihak penerima amanah.

Dokumen ini merupakan gambaran pencapaian target-target sasaran dari setiap Agenda, Kebijakan dan Program Pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2023. Evaluasi kinerja ini perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, nampak bahwa masih terdapat indikator sasaran yang tidak dapat diukur, hal ini disebabkan karena indikator-indikator tersebut bersifat kualitatif. Namun demikian, capaian indikator utama yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara nampak telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan pada pencapaian tahun keempat RPJMD Provinsi Maluku Utara.



Pengukuran kinerja serta analisis capaian kinerja sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya memuat pencapaian kinerja tahun pelaporan (2023) dan juga membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya serta beberapa tahun sebelumnya, yang muaranya mengarah pada target akhir pencapaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam melaksanakan program/kegiatan dalam upaya pencapaian indikator kinerja, masih terdapat permasalahan yang sangat mendasar yakni masih adanya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan program yang telah disepakati dalam RPJMD, hal ini disebabkan karena Rencana Pembangunan Strategis (RENSTRA) SKPD yang menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan pada setiap SKPD belum seutuhnya bersinergi dengan RPJMD tahun 2020 -2024. Dengan kondisi yang demikian maka apa yang dilakukan oleh sebagian SKPD tidak terfokus pada upaya pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perbaikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Maluku Utara masih harus terus dilakukan demi pencapaian hasil dari Visi dan Misi Gubernur.